**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Gambaran Umum Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Papua.

1. **Kewenangan**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

1. **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
2. Sekretariat Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, meliputi:
3. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Sub Bagian Program
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi :
7. Seksi Pengelolaan Bantuan
8. Seksi Perlindungan Sosial
9. Seksi Jaminan Sosial
10. Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk, meliputi :
11. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
12. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
13. Seksi Monitoring dan Evaluasi
14. Bidang Fasilitas Adminduk, meliputi :
15. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
16. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
17. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
18. Unit Teknis Pelayanan Daerah (UPTD)
19. UPTD BIAK
20. UPTD SENTANI
21. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan pemukiman serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang social dan pemukiman
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemukiman
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemukiman
4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pemukiman
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. **Jumlah Pegawai**

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menurut pangkat dan golongan per 31 Januari 2018 dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Golongan | Jumlah | |
| 1 | Golongan I | 6 | Orang |
| 2 | Golongan II | 50 | Orang |
| 3 | Golongan III | 136 | Orang |
| 4 | Golongan IV | 20 | Orang |
|  | **Jumlah** | **212** | **Orang** |

*Sumber :Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Thn 2018*

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua per 31 Januari 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |
| 1 | Sekolah Dasar | 6 | Orang |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 6 | Orang |
| 3 | Sekolah Menengah Umum/ Kejuruan | 83 | Orang |
| 4 | Sarjana Muda | 6 | Orang |
| 5 | Sarjana (S1) | 99 | Orang |
| 6 | Pasca Sarjana (S2) | 10 | Orang |
| 7 | Doktor (S3) | 2 | Orang |
|  | **Jumlah** | **212** | **Orang** |

*Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Thn 2018*

Sedangkan Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil menurut jenis kelamin per 31 Januari 2018 adalah dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 1.3**

**Jumlah Pegawai Dinas Menurut Penyebarannya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tempat Kerja | Jumlah | |
| 1 | Dinsos dan DukCapil | 133 | Orang |
| 2 | Pejabat Fungsional | 9 | Orang |
| 3 | Panti Sosial Jayapura   1. Tata Usaha Panti 2. Seksi Bina Remaja 3. Seksi Lanjut Usia 4. Seksi Karya Wanita | 16  7  23  9 | Orang  Orang  Orang  Orang |
| 4 | Panti Sosial Bina Netra Cendrawasih Biak   1. Tata Usaha Panti 2. Seksi Bimbingan & Ketrampilan 3. Seksi Bimbingan Lanjut usia 4. Seksi Identifikasi & Registrasi | 5  3  3  4 | Orang  Orang  Orang  Orang |
|  | **Jumlah** | **212** | **Orang** |
|  | Laki-Laki  Perempuan | 136  76 | Orang  Orang |

*Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Thn 2018*

Untuk Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil menurut Jenjang Jabatan Struktural sampai 31 Januari 2018, dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4**

**Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Jabatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Jumlah | |
| 1 | Eselon II | 1 | Orang |
| 2 | Eselon III | 7 | Orang |
| 3 | Eselon IV | 23 | Orang |
| *4* | *Jabatan Fungsional* | *9* | *orang* |
| J u m l a h | | **40** | **Orang** |

*Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Thn 2018*

1. **Analisis Faktor-Faktor dan Eksternal**

Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini dan yang akan datang masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai akibat dari kelemahan -kelemahan yang membutuhkan tindakan pembenahan dan perbaikan maupun ancaman-ancaman dari luar yang akan dihadapi. Namun demikian dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki apabila dikelola dengan baik akan menciptakan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. Situasi dan kondisi yang demikian kompleks, ancaman-ancaman dari luar harus tetap diwaspadai. Faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

* 1. **Faktor Internal**

1. Kekuatan :

Sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dana operasional Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua yang dialokasikan merupakan modal sosial dalam bentuk materi yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan sosial.

1. Kelemahan

* Kualitas sumber daya manusia Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua belum profesional dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan kemampuan dan proporsi penyebaran SDM penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial hampir pada semua tingkatan belum mampu mengimbangi jumlah, bobot dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial.
* Lemahnya disiplin pegawai dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
  1. **Faktor eksternal**

1. Peluang

* Komitmen global tentang pembangunan sosial : tingginya komitmen masyarakat internal, regional dan nasional terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.
* Kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM.

1. Ancaman

* Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial;
* Lemahnya koordinasi antar satuan kerja.
* Kinerja pihak-pihak yang peduli terhadap pelayanan kesejahteraan sosial yang menurun;

1. **Maksud dan Tujuan LAPKIN**

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Menyelenggarakan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang berstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai nilai akuntabilitas menuju tata kelola yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh.Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data tepat dan akurat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Esensi dari sistem LAPKIN bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Papua. Sistem Pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provoinsi Papua dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannnya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAPKIN diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholder*s dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) memiliki dua fungsi utama. *Pertama,* laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur dan masyarakat). *Kedua,* laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAPKIN tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAPKIN oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAPKIN Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi LAPKIN 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAPKIN 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dapatmerumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. **Sistematika LAPKIN**

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pendanaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2017 .

Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempuyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input, output* dan *outcome.*

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa depan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian Laporan Kinerja instansi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua tahun 2017 , diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I : | - | Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAPKIN 2017. |
| BAB II : | - | Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk periode 2013 – 2018 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2017. |
| BAB III : | - | Akuntabililtas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dikaitkan dengan target serta realisasi kinerja dan realisasi anggaran. |
| Bab IV : | - | Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Tahun 2017 ini menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang. |

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS**

1. **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dalam lima (5) tahun.

1. **Visi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua**

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi DInas Sosial dan Pemukiman, serta mencermati latar belakang, lingkungan internal dan eksternal serta adanya harapan untuk pemenuhan aspirasi masyarakat Papua dan global, maka Visi dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua sesuai tertuang didalam Renstra 2013-2018 adalah :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL DAN PEMUKIMAN MENUJU PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

1. **Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua**
2. Mengembangkan sistim tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
3. Mengembangkan sistim pelayanan sosial dalam bentu rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara kesejahteraan sosial dalam lingkup lokal dan global.
4. Mengembangkan jejaring kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan (S*takeholder*) dan organisasi terkait, secara nasional, regional dan internasional.
5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman serta perumahan rakyat yang layak huni.
6. **Tujuan**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua telah merumuskan tujuan yang merupakan bagian dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai visi dan misi.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesionalisme dan akuntabel.
2. Meningkatkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial
3. Meningkatkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial.
4. Meningkatkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial.
5. Meningkatkan jejaring kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan organisasi terkait secara nasional, regional dan internasional.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan rakyat layak huni.
7. **Strategi Pencapaian**

Strategi pokok yang digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kampanye Sosial, memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Kemitraaan Sosial, adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak - pihak yang bermitra.
3. Partisipasi Sosial, adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
4. Advokasi sosial, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.
5. Desentralisasi sosial, yang mengandung makna adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumber daya lokal sesuai karakteristik budaya setempat.
6. **Kebijakan**

Sebagai upaya untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial maka kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil dalam arti bahwa setiap orang khususnya PMKS berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistim yang kondusif dan mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentraliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat setempat.
6. Menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kessos dengan mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat papua.
7. **Program**

Program - program strategis yang akan dilaksananakan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. APBD
2. Program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Peningkatan disiplin aparatur
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8. Program Urusan Wajib Sosial
9. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
10. Program penataan administrasi kependudukan
11. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
12. Program pengelolaan Areal Pemakaman
13. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
14. Perlindungan dan jaminan sosial
15. Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti
16. Program sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial
17. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial
18. Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
19. Pengembangan data base kependudukan
20. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
21. Sosialisasi kebijakan Kependudukan (DAK)
22. APBN
23. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:
24. Perencanaan dan Penganggaran
25. Program Pemberdayaan Sosial
26. Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial
27. Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
28. Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) ( Dekon dan TP)
29. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial
30. Program Rehabilitasi Sosial
31. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza
32. Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
33. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
34. Rehabilitasi sosial anak
35. Rehabilitasi sosial lanjut usia
36. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
37. Perlindungan sosial korban bencana alam
38. Perlindungan sosial korban bencana sosial
39. Jaminan sosial keluarga
40. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
41. Penyuluhan Sosial
42. **RENCANA KINERJA DINAS**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 maka disusun Rencana Kinerja Dinas tiap tahunnya. Rencana Kinerja ini disusun lebih rinci yang nantinya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DIPA Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. DPA dan DIPA ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

DPA merupakan komitmen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. DPA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja ini dengan menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. **Penetapan Sasaran Strategis.**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua telah mengindentifikasikan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen yang telah ada.

1. **Penetapan Program.**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategi diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1. **Penetapan Kegiatan*.***

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Di sini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus didefisinikan.

1. **Penetapan Target Kinerja**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil berkesinambungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja Tahun 2017 yang merupakan proses perencanaan kinerja didokumentasikan dalam rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*).

Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran tahun 2017 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2017 yang merupakan komitmen Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicapai pada tahun tersebut.

Secara umum tujuan penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2017 antara lain :

* + 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dilingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil.
    2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksankan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
    3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
    4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di kementerian Kesejahteraan Sosial.
    5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan *(reward)* maupun sanksi.

Sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut : (terlampir)

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan, sedangkan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan dengan Indikator Kinerja Sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

1. Data Internal, berasal dari system informasi yang diterapkan di SKPD,
2. Data Eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiataan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran kinerja mencakup : (1). Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana di tuangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instransi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Evaluasi dalam siklus pelaksanaan suatu program sangat penting dilakukan untuk mengetahui capaian realisasi kemajuan dan hambatan / kendala yang dialami selama proses berlangsung sampai tercapainya target / sasaran. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diukur dan dinilai capaian program kegiatan termasuk didalamnya bila dilihat ketercapaian efisiensi dengan cara menbandingkan antara *output* dengan *input* baik dalam perencanaan maupun realisasi.

Evaluasi lebih lanjut dapat dijadikan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu memberikan gambaran kesesuaian antara tujuan yang akan dicapai dengan hasil serta manfaat yang diterima PMKS / dampak (*Out come*).

Dengan adanya evaluasi secara konfrenhesif maka akan terlihat perbedaan kinerja (*performance gap*) yang dialami / terjadi.

Dengan ditampilkannya *performance-gap* akan dipakai permasalahan yang dihadapi serta strateegi pemecahannya dimasa yang akan datang. Adapun perbandingan evaluasi Kinerja yang dilalui adalah Kinerja Riil agar kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan serta kinerja Riil dengan kinerja tahun – tahun sebelumnya.

Pengukur kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dilakukan dengan menampilkan rasio kinerja *out put* yaitu dengan rumus perbandingan reaslisasi *out put* dengan target *out put* dikali 100 %, sedangkan capaian kinerja program dengan membandingkan realisasi capaian *out come* dan target *out come* dikali 100 %.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan Skala Ordinal penilaian Untuk mengukur sampai sejauhmana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

**TABEL 3.1**

**Skala Ordinal Penilaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Nilai** | **Kategori** |
| 1 | 91 ≥ … | Sangat berhasil |
| 2 | 76 ≥ 90 | Berhasil |
| 3 | 66 ≥ 75 | Cukup berhasil |
| 4 | 51 ≥ 65 | Kurang berhasil |
| 5 | 0 ≥ 50 | Tidak berhasil |

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dalam mencapai sasaran strategisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Capaian Kinerja Sasaran 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** |
| Misi 3 : Gubernur Papua | | Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia | | | | | |
| Misi 2 : Dinas Sosial | | Mengembangkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehateraan sosial dalam lingkup lokal dan global | | | | | |
| **1.** | **Pengentasan Kemiskinan** | 1. **Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan** |  | |  | | **100,00** |
|  |  | * Jumlah pendamping yang mendapat pelatihan kemampuan kapasitas | 100 | org | 100 | org | 100,00 |
|  |  | * Jumlah keluarga miskin perdesaan yang mendapat bantuan KUBE | 500 | KK | 500 | KK | 100,00 |
|  |  | * Jumlah keluarga miskin perkotaan yang mendapat bantuan KUBE | 500 | KK | 500 | KK | 100,00 |
|  |  | * Jumlah pendamping perkotaan yang mendapat bimbingan tekni | 33 | Org | 33 | Org | 100,00 |
|  |  | * Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang PKH | 150 | Org | 150 | org | 100,00 |
|  |  | * Jumlah pendamping PKH di tingkat kecamatan | 227 | Org | 227 | Org | 100,00 |
| **Rata-rata capaian kinerja Sasaran 1** | | | | | | | **100,00** |

Capaian kinerja pada sasaran pengentasan kemiskinan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 adalah sebesar 100,00 % dengan kategori **sangat berhasil**. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :

1. Pada tahun 2016 jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sebanyak 1300 KK, sedangkan pada tahun 2017 jumlah keluarga miskin yang dibantu adalah sebanyak 1000 KK, hal ini menunjukan bahwa sudah cukup banyak jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholders* lainnya termasuk petugas pendamping sehingga dalam pelaksanaan program PKH dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 3.3**

**Capaian Kinerja Sasaran 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** | | |
| Misi 3 : Gubernur Papua | | Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia | | | | | | | |
| Misi 2 : Dinas Sosial | | Mengembangkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehateraan sosial dalam lingkup lokal dan global | | | | | | | |
| **2.** | **Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** | 1. **Jumlah sarana dan prasarana infrastrukur yang tersedia bagi warga KAT** |  | |  | | | **83,08** | |
|  |  | * Jumlah bantuan stimulant pemukiman warga KAT | 133 | Unit | 103 | Unit | | 77,44 | |
|  |  | * Jumlah warga KAT yang mendapat jaminan hidup | 133 | KK | 103 | KK | | 77,44 | |
|  |  | * Jumlah warga KAT yang mendapat bantuan bibit tanaman, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga | 133 | KK | 103 | KK | | 77,44 | |
|  |  | * Jumlah pendamping KAT yang diberdayakan | 100 | Org | 100 | Org | | 100 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah lanjut usia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial** |  | |  | | | **100,00** | |
|  |  | * Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan | 100 | Org | 100 | Org | | 100 | |
|  |  | * Jumlah pendamping dan petugas Kab / Kota | 48 | Org | 48 | Org | | 100 | |
|  |  | * Jumlah lansia yang dilatih di dalam panti | 70 | Org | 70 | Org | | 100 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah anak yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial** |  |  |  |  | | **100,00** | |
|  |  | * Anak balita, anak terlantar dan anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) | 350 | anak | 350 | anak | | 100 | |
|  |  | * Tabungan sosoal anak (TASA) | 300 | anak | 300 | anak | | 100 | |
|  |  | * One Day For Children (Respon kasus anak / TRC perlindungan anak) | 200 | anak | 200 | anak | | 100 | |
|  |  | * Pendampingan Anak dengan Bantuan Hukum | 50 | anak | 50 | anak | | 100 | |
|  |  | * Jumlah RPSA | 1 | Lok | 1 | Lok | | 100 | |
|  |  | * Paket kebutuhan kedaruratan anak | 50 | anak | 50 | Anak | | 100 | |
|  |  | * Jumlah anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan melaui panti | 60 | Org | 60 | Org | | 100 | |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah Penyandang Cacat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial** |  | |  | | | **100** | |
|  |  | * Jumlah penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial | 130 | Org | 130 | Org | | 100 | |
|  |  | * Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan | 100 | Org | 100 | Org | | 100 | |
|  |  | * Jumlah cacat netra yang mendapatkan pelayanan didalam panti | 18 | Org | 18 | Org | | 100 | |
|  |  | * Bantuan alat bantu fisik | 30 | Org | 30 | org | | 100 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah Tuna Sosial yang terlayani** |  | |  | | | **100** | |
|  |  | * Jumlah klient yang dipulangkan | 10 | Org | 10 | Org | | 100 | |
|  |  | * Kursus ketrampilan bagi Tuna susila serta orang dengan HIV-AIDS | 20 | Org | 20 | Org | | 100 | |
|  |  | * Jumlah Bantuan UEP Tuna Susila | 20 | Org | 20 | Org | | 100 | |
|  |  | * Bantuan UEP ODHA | 20 | Org | 20 | Org | | 100 | |
|  |  | * WRSE yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial | 60 | ORG | 60 | Org | | 100 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah Korban Napza yang terlayani** |  | |  | | | **100** | |
|  |  | * Bantuan UEP bagi korban penyalahgunaan Napza | 15 | Org | 15 | Org | | 100 | |
|  |  | * Penjangkauan korban Napza dari 2 Kabupaten | 30 | Org | 30 | Org | | 100 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | 1. **Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani** |  | |  | | | | **100** |
|  |  | * Pembentukan lokasi kampung siaga bencana | 1 | Lok | 1 | Lok | | | 100 | |
|  |  | * Tersedianya buffer stok kebencanaan | 1 | Pkt | 1 | Pkt | | | 100 | |
|  |  | * Pemantapan TOT dukungan psikososial | 50 | Org | 50 | Org | | | 100 | |
|  |  | * Pemantapan TOT petugas Shelter PB | 50 | Org | 50 | Org | | | 100 | |
| **Rata-rata capaian kinerja Sasaran 2** | | | | | | | | | **100,00** |

Capaian indikator pertama adalah jumlah sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarakat KAT yang tersedia, jaminan hidup, bantuan peralatan kerja dan infrastruktur bagi warga KAT serta pendampingan dengan capaian sebesar 83,08%, maka masuk dalam kategori capaian tersebut **Berhasil**. untuk capaian indikator kinerja ke-2 adalah jumlah lanjut usia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan UEP, pelayanan melalui LKS serta pengembangan kelembagaan lanjut usia adalah dengan capaian sebesar 100,00%, maka dapat dikategorikan capaian tersebut **Sangat Berhasil.** Untuk capaian indikator kinerja ke-3 adalah jumlah anak yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial melalui PKSA, pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi, one day for children dan pengembangan PKSA adalah sebanyak 200 anak dengan capaian sebesar 100% dengan kategori **sangat berhasil**, untuk capaian indikator ke-4 jumlah penyandang cacat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial adalah sebanyak 130 orang dengan capaian sebesar 100%, untuk indikator capaian kinerja ke-5 adalah jumlah tuna sosial yang terlayani adalah sebanyak 10 orang dengan capaian 100%, untuk capaian indikator ke-6 adalah jumlah korban napza yang terlayani adalah sebanyak 30 orang dengan capaian sebesar 100%, untuk capaian indikator ke-7 adalah jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani melalui pemantapan petugas sebanyak 250 orang dengan capaian sebesar 100%

Dari sasaran 2 dengan 7 (tujuh) indikator diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori **sangat berhasil**. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :

1. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten / Kota serta *stakeholders* lainnya termasuk petugas pendamping sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Sosial RI sehingga penanganan terhadap PMKS dapat terlaksana setiap tahun. Hal ini berpengaruh pada jumlah PMKS yang ditangani yang dapat berdampak pada penurunan prosentase PMKSnya;

**Tabel 3.4**

**Capaian Kinerja Sasaran 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** |
| Misi 3 : Gubernur Papua | | Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia | | | | | |
| Misi 2 : Dinas Sosial | | Mengembangkan sistim pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehateraan sosial dalam lingkup lokal dan global | | | | | |
| **3.** | **Meningkatnya Aksesibilitas PMKS terhadap Pelayanan sosial dasar** | 1. Jumlah Lanjut Usia yang mendapat pelayanan sosial dasar di dalam panti | 70 | Org | 70 | Org | 100 |
|  |  | 1. Jumlah cacat netra yang mendapat pelayanan sosial dasar di dalam panti | 18 | Org | 18 | Org | 100 |
|  |  | 1. Jumlah Organisasi sosi sosial yang mendapat pembinaan |  |  |  |  |  |
|  |  | * Jumlah TMPN/TMP/MPN yang dipelihara | 4 | Unit | 4 | Unit | 100 |
|  |  | * Jumlah pra manggala dan manggala Indonesia yang dibentuk | 460 | Org | 460 | Org | 100 |
|  |  | * Jumlah bantuan operasional yang diberikan kepada LK3 | 21 | Unit | 21 | Unit | 100 |
|  |  | * Jumlah LKS / Orsos yang mendapat bimbingan pemantapan manajemen | 56 | Orsos | 56 | Orsos | 100 |
|  |  | * Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapat bimbingan teknis | 30 | Org | 30 | Org | 100 |
|  |  | * Jumlah PSM yang yang mendapat bimbingan sosial | 40 | Org | 40 | Org | 100 |
|  |  | * Jumlah desa yang mendapat bimibngan kerja sama dan penguatan kelembagaan | 10 | Desa | 10 | Desa | 100 |
|  |  | * WKSBM yang mendapatkan bimbingan teknis | 28 | WKSBM | 28 | WKSBM | 100 |
|  |  | * Jumlah mitra usaha yang mendapat pemantapan program peningkatan dunia usaha | 30 | CSR | 30 | CSR | 100 |
|  |  | * Pelaksanaan bimbingan teknis potensi lembaga konsultasi peduli keluarga (FCU) | 18 | Org | 18 | Org | 100 |
|  |  | 1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) yang mendapat pembinaan | 524 | Org | 524 | Org | 100 |
|  |  | 1. Jumlah TAGANA muda yang mendapat pembinaan | 50 | Org | 50 | Org | 100 |
| **Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3** | | | | | | | 100 |

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar dengan capaian indikator kinerja ke-1 adalah jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan sosial dasar di dalam panti adalah sebanyak 70 orang dengan capaian 100%, untuk capaian indikator ke-2 adalah jumlah penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di dalam panti adalah sebanyak 18 orang dengan capaian 100%, untuk capaian indikator kinerja ke-3 adalah jumlah organisasi sosial yang mendapat pembinaan dengan capaian 100%, untuk capaian indikator ke-4 adalah jumlah TKSK yang mendapat pembinaan sebanyak 524 orang dengan capaian 100% dan untuk capaian indikator ke-5 adalah jumlah TAGANA muda yang mendapat pembinaan sebanyak 50 orang dengan capaian 100%.

Dari sasaran 3 dengan 5 (lima) indikator kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **sangat berhasil**. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil telah membangun 130 unit rumah layak huni dan terealisasi 103 unit sehingga persen realisasi fisiknya 77,44% dengan tepat waktu, sedangkan pada tahun. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan terhadap sarana dan prasarana perumahan yang layak huni mengalami peningkatan dari sisi kuantitas maupun kualitas bagi masyarakat.
2. Dukungan dari aparatur dan *stakeholders* yang terkait dengan kegiatan ini yang berjalan dengan baik.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** |
| Misi 5 : Gubernur Papua | | Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedapankan prinsip pembangunan berkelanjutan | | | | | |
| Misi 4 : Dinas Sosial | | Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman serta perumahan rakyat yang layak huni | | | | | |
| **4.** | **Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan rakyat yang layak huni** | 1. Jumlah rumah layak huni yang dibangun | 133 | Unit | 103 | Unit | 77,44 |
| * Jumlah bantuan stimulant sarana / prasarana lingkungan berupa bak penampungan air | 7 | Unit | 6 | Unit | 85,71 |
|  |  | 1. Jumlah Laporan Dokumen POKJA KAT yang disusun | 4 | Lap | 4 | Lap | 75,00 |
| **Rata-rata capaian kinerja Sasaran 4** | | | | | | | 87,71 |

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan rakyat yang layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang dibangun sebanyak 103 unit dengan capaian 77,44% dan jumlah laporan hasil dokumen pembentukan POKJA Perumahan sebanyak 4 Dokumen laporan dengan capaian 100% Namun pada realisasi dilapangan pada Kabupaten Lanny Jaya tidak terbangun dikarenakan adanya masalah konflik sosial pada daerah setempat, baik pembangunan rumah maupun bak penampungan air.

Dari sasaran 4 dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 87,71% dengan kategori **berhasil**. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Dukungan serta kerja sama dari aparatur dan stake holders yang terkait dengan kegiatan ini yang berjalan dengan baik.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran 5

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET (Volume)** | | **REALISASI (%)** | | **CAPAIAN KINERJA (%)** |
| Misi 2 : Gubernur Papua | | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS | | | | | |
| Misi 1 : Dinas Sosial | | Mengembangkan sistim tata kelola dan akuntabilitas penlenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial | | | | | |
| **5.** | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD** | 1. Hasil Evaluasi SAKIP | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 |
| **Rata-rata capaian kinerja Sasaran 5** | | | | | | | 100 |

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD adalah hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6 adalah sebesar 100 % dengan kategori **sangat berhasil**. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ditunjukan oleh Hasil evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua pada Tahun 2014 memperoleh nilai 36.16% dengan kategori “Cukup”. Sedangkan Hasil evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua pada Tahun 2015 memperoleh nilai 79.32% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan Akuntabilitas Kinerja bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.

1. **REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua yang didanai oleh APBD terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 28.916.228.000,- *( Dua Puluh Delapan Milyard Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dilaksanakan target kinerja untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.
2. Belanja Langsung sebesar Rp 23.136.369.000,-*(Dua Puluh Tiga Milyard Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dilaksankaan dengan target kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. Dengan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

ANGGARAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Anggaran | Realisasi Keuangan | |
| **(Rp)** | **Rp** | **%** |
| 1. APBD | | **52.052.597.000** | **47.149.224.063** | **90,58** |
| I. | **Belanja Tidak Langsung** | **28.916.228.000** | **26.657.806.263** | **92,19** |
| II. | **Belanja Langsung** | **23.136.369.000** | **20.491.417.800** | **88,57** |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 4.148.699.500 | 3.216.879.043 | 77,54 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.016.250.000 | 1.897.777.590 | 94,12 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 458.000.000 | 442.999.482 | 96,72 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |
| 6. | Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 376.375.000 | 365.150.000 | 97,02 |
| 7. | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 270.000.000 | 259.219.000 | 96,01 |
| 8. | Program areal pemakaman | 5.000.000.000 | 4.602.313.686 | 92,05 |
| 9. | Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat | 294.500.000 | 230.300.000 | 78,20 |
| 10. | Program perlindungan dan Jaminan sosial | 1.039.600.500 | 1.022.880.000 | 98,39 |
| 11. | Program pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti | 5.000.000.000 | 4.859.805.200 | 97,20 |
| 12. | Program sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial | 457.575.000 | 443.082.400 | 96,83 |
| 13. | Program peningkatanan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial | 733.000.000 | 703.000.000 | 95,91 |
| 14. | Program penataan administrasi kependudukan | 3.137.369.000 | 2.243.011.400 | 71,49 |

*Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua 2017*

1. Sedangkan anggaran yang di danai oleh APBN sebesar Rp 29.361.797.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*),- dilaksanakan dengan target kinerja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. Dengan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**

**ANGGARAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**PROVINSI PAPUA TAHUN 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Anggaran | Realisasi Keuangan | |
| **(Rp)** | **Rp** | **%** |
| 1. APBN | | **29.361.797.000** | **25.931.096.474** | **88,32** |
| 1 | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 440.086.000 | 440.086.000 | 100,00 |
| 2 | Program pemberdayaan sosial | 5.320.773.000 | 5.120.015.000 | 96,23 |
| 3 | Program pemberdayaan sosial  Pemberdayaan KAT (TP) | 10.940.510.000 | 8.081.459.572 | 73,87 |
| 4 | Program rehabilitasi sosial | 1.585.385.000 | 1.451.024.032 | 91,53 |
| 5 | Program perlindungan dan jaminan sosial | 7.601.771.000 | 7.520.750.630 | 98,93 |
| 6 | Program penanganan fakir miskin | 3.272.850.000 | 3.117.339.240 | 95,25 |
| 7 | Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan penyuluhan sosial | 200.422.000 | 200.422.000 | 100,00 |

*Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua 2017*

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Secara umum kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua tahun 2017 dapat dinyatakan berhasil. Hali ini dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi sasaran tahun 2017 diketahui bahwa rata-rata sasaran telah tercapai dan telah berhasil dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan di tahun 2018, sehingga kinerja ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Mencermati permasalahan atau kendala terdapat pada masing-masing sasaran, maka dapat disimpulkan ada beberapa masalah umum dan sekaligus merumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai berikut :

1. **Kendala**
2. Capaian realisasi program dan anggaran belum proposional pada setiap triwulannya, realisasi cenderung meningkat pada triwulan III dan IV. Hal tersebut dikarenakan SK penunjukkan pengelola keuangan oleh Gubernur rata-rata baru terbit.
3. Adanya konflik sosial di masyarakat kabupaten seperti Kabupaten Lanny Jaya membuat terhambatnya pembangunan dan bahkan tidak terealisasikan fisik walaupun sudah di lelangkan di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua.
4. Keberlanjutan *(sustainability)* program sangat diharapkan demi terjaminnya perberdayaan PMKS, baik program peningkatan kapasitas masyarakat maupun permodalan.
5. Tidak dimilikinya Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah dalam penanganan anak jalanan, anak terlantar atau korban narkotika serta PMKS lainnya yang memerlukan penanganan rehabilitasi sosial sesegera mungkin.
6. **Solusi**
7. Melakukan asistensi ke berbagai bidang yang terlambat merealisasikan program dan anggarannya dan mendorong untuk melakukan percepatan.
8. Upaya strategis dalam pemberdayaan kemitraaan, Pemberdayaan kelompok masyarakat harus diupayakan melalui perencanaan yang strategis dan terpadu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
9. Apabila rencana strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua diimplementasikan secara baik dan benar maka dimasa mendatang Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dapat memberikan kontribusi khususnya berperan aktif lagi dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang merupakan dambaan segenap komponen masyarakat.
10. Adanya kerjasama dari pemerintah baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten / Kota untuk membangun balai rehabilitasi anak yang cukup memadai dan memiliki sarana / prasarana yang lengkap sehingga penanganan masalah anak dapat terbantu dan mengurangi kenakalan anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. Harapan kami dengan disusunnya LAPKIN Tahun 2017 secara akuntabel kepada s*takeholders*dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Jayapura, 14 Februari 2018

KEPALA DINAS,

DR. RIBKA HALUK, S.SOS, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip: 19710110 199610 2 001